

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi pendapatan yang merata (Ningsih et al., 2019). Untuk meningkatkan kemajuan pembangunan nasional, diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran (Hasan and Piliang, 2023). Menurut Todaro dan Smith dalam (Mardani, 2024) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah Pertumbuhan Ekonomi. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemampuan perekonomian suatu wilayah untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun, di mana suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila aktivitas ekonominya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (Mardani, 2024).

Menurut Todaro dalam (Maisaroh and Amin, 2025) pembangunan merupakan proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku masyarakat serta kelembagaan nasional yang di tandai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya dan lingkungan yang saling berinteraksi secara dinamis. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan juga bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka pengangguran (Christianingrum, 2021).

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan dengan pembangunan daerah, namun hasil pembangunan setiap daerah berbeda-beda karena perbedaan potensi sumber daya, kualitas sumber daya manusia, aglomerasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian (Zasriati, 2020). Ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan dengan potensi daerah dapat mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memunculkan ketimpangan antar wilayah (Harsono et al., 2025).

Fenomena ketimpangan dapat terjadi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga skala nasional maupun global. Ketimpangan pembangunan berpotensi menghambat peningkatan produktivitas dan mengurangi kemampuan daerah untuk tumbuh secara cepat dan berkesinambungan. Ada sejumlah faktor yang mendorong terjadinya perbedaan pembangunan antar wilayah di Indonesia, seperti pemusatan aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu, distribusi investasi yang tidak merata, terbatasnya perpindahan faktor-faktor produksi antar daerah, ketidaksamaan potensi sumber daya alam, perbedaan karakteristik geografis, serta terhambatnya arus perdagangan antar provinsi akibat infrastruktur yang belum memadai (Taufiqurrachman et al., 2024). Perspektif teori pertumbuhan neoklasik, ketimpangan antar wilayah terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi di setiap daerah (Raharti et al., 2021). Pada tahap awal pembangunan, aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga ketimpangan meningkat (Robertus and Hendarto, 2024). Namun, dalam jangka panjang ketimpangan diperkirakan akan menurun seiring dengan mobilitas faktor produksi yang mendorong proses konvergensi

antar wilayah (Ashfahani, 2019). Hal ini sejalan dengan Hipotesis Kuznets yang menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan membentuk pola U terbalik, di mana ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu (Oktarina and Yuliana, 2023).

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan suatu daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, seperti kondisi demografi, sumber daya alam, dan distribusi kegiatan ekonomi, menyebabkan kemampuan tiap daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbeda-beda (Azim et al., 2022). Akibatnya, sebagian wilayah berkembang lebih cepat dan menjadi wilayah maju, sedangkan wilayah lain relatif tertinggal (Nugraha et al., 2020). Wilayah maju umumnya ditandai oleh tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, serta didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah tertinggal memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta keterbatasan dalam infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan hasil-hasil pembangunan antar wilayah menjadi semakin nyata, sehingga diperlukan suatu pendekatan analisis yang mampu mengidentifikasi posisi relatif setiap daerah secara lebih terukur.

Pembangunan yang berlangsung di Provinsi Maluku Utara mengalami perkembangan pesat sejak ditetapkannya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017. Proyek tersebut mencakup pembangunan Kawasan Industri Buli di Kabupaten Halmahera Timur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, serta pengembangan fasilitas smelter

sebagai bagian dari program hilirisasi mineral (Ambar et al., 2021). Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020, pemerintah kembali menambahkan proyek strategis lainnya seperti Kawasan Industri Pulau Obi dan Kawasan Industri Weda Bay, yang kemudian menjadi pusat aktivitas industri nikel di wilayah timur Indonesia. Di antara berbagai sektor yang berkembang, nikel menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan struktur ekonomi di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Obi. Kedua wilayah tersebut mengalami transformasi yang signifikan dari ekonomi berbasis sektor primer menuju sektor industri pengolahan mineral yang terintegrasi secara global. Kehadiran industri nikel tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga menarik investasi skala besar serta mempercepat industrialisasi daerah.

Perkembangan wilayah tercermin dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat dari 6,25% pada tahun 2019 menjadi 20,49% pada tahun 2023, bahkan mencapai lebih dari 30% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah yang menarik investasi miliaran dolar serta melibatkan berbagai perusahaan global dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, kawasan industri di Pulau Obi juga berkembang pesat melalui aktivitas industri nikel terintegrasi yang meningkatkan posisi strategis Maluku Utara dalam peta industri global.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pembangunan antar wilayah. Fenomena ketidakmerataan terlihat dari masih adanya peningkatan jumlah penduduk miskin, meskipun pertumbuhan ekonomi

daerah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Selain itu, konsentrasi aktivitas industri pada wilayah tertentu, seperti Halmahera Tengah, menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pembangunan antar kabupaten/kota. Dominasi sektor industri nikel juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aspek sosial dan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, konflik sosial, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Kondisi dominasi sektor industri nikel di Halmahera Tengah mencerminkan adanya paradoks pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Perspektif teori ketimpangan regional, menjelaskan kecenderungan konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu yang menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin melebar. Meskipun aktivitas ekonomi meningkat drastis, pembangunan hingga tahun 2024 masih menunjukkan ketidakmerataan antar wilayah. Beberapa kabupaten di Maluku Utara, seperti Kabupaten Halmahera Barat khususnya Kecamatan Ibu dan Loloda masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan dan telekomunikasi yang belum memadai. Pemerintah daerah juga cenderung memusatkan pembangunan di wilayah ibu kota kabupaten, sehingga daerah pinggiran tertinggal dalam akses pembangunan.

Di Kabupaten Halmahera Utara, aktivitas pertambangan emas belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Penyerapan tenaga kerja sebagian besar justru berasal dari luar Maluku Utara, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat belum sepenuhnya tercapai. Fenomena aglomerasi ekonomi juga tampak jelas di Kota Ternate, yang menjadi pusat perdagangan, perkantoran, pendidikan dan layanan publik. Konsentrasi ekonomi

di kota tersebut menyebabkan laju pertumbuhan yang cenderung lebih stabil dibandingkan wilayah dengan potensi ekonomi terbatas. Kabupaten Halmahera Utara mencerminkan karakteristik *enclave economy*, yaitu suatu pola kegiatan ekonomi yang berkembang pesat namun tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan perekonomian lokal. Aktivitas pertambangan cenderung bersifat terisolasi, ditandai dengan dominasi tenaga kerja dari luar daerah, penggunaan input produksi yang berasal dari luar wilayah, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi. Akibatnya, meskipun terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, manfaatnya tidak terdistribusi secara luas sehingga tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Fenomena minimnya keterlibatan ekonomi lokal dalam aktivitas pertambangan juga berkaitan dengan konsep *resource curse*, di mana ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam yang bersifat padat modal (*capital-intensive*) justru membatasi penciptaan lapangan kerja dan menghambat perkembangan sektor ekonomi lainnya. Kondisi seperti ini, sektor *non-ekstraktif* seperti pertanian dan usaha kecil cenderung kurang berkembang, sehingga struktur ekonomi menjadi tidak seimbang dan rentan terhadap ketimpangan. Di sisi lain, Kota Ternate menunjukkan karakteristik aglomerasi ekonomi, yaitu pemusatan aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu yang didukung oleh infrastruktur, aksesibilitas, serta konsentrasi penduduk. Aglomerasi menciptakan efisiensi ekonomi melalui kedekatan antar pelaku usaha, kemudahan distribusi, serta meningkatnya peluang kerja di berbagai sektor. Oleh karena itu, wilayah perkotaan seperti Ternate cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih

stabil dan terdiversifikasi dibandingkan daerah berbasis pertambangan yang bersifat *enclave economy*.

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan wilayah dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi paling signifikan, terutama pada tahun 2021 ketika pertumbuhan PDRB mencapai angka yang sangat tinggi akibat aktivitas industri nikel yang dikelola PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pertumbuhan ekstrem pada tahun tersebut menjadi faktor utama yang mendorong rata-rata pertumbuhan Halmahera Tengah berada pada posisi tertinggi selama periode 2018-2024. Perusahaan ini menyerap tenaga kerja dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara. Tingginya migrasi tenaga kerja ke wilayah industri berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Halmahera Selatan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang tinggi dan relatif stabil dari tahun ke tahun, sehingga menempati posisi kedua tertinggi dalam rata-rata pertumbuhan ekonomi periode 2018-2024. Namun, pertumbuhan ekonomi yang sangat terpusat pada beberapa lokasi industri berpotensi memperlebar disparitas pembangunan antar wilayah.

Fenomena terpusatnya pertumbuhan ekonomi pada beberapa lokasi industri mencerminkan pola pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor ekspor (*export-led growth*), di mana kinerja ekonomi daerah sangat bergantung pada komoditas unggulan yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Strategi ini sering dikaitkan dengan peningkatan investasi dan integrasi ke pasar internasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan global, yang pada gilirannya mendorong

arus investasi, termasuk investasi asing, ke wilayah-wilayah pusat produksi seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat terpusat pada sektor tertentu dan wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah akibat tidak meratanya distribusi aktivitas ekonomi (Septiani and Endang, 2022). Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *Dutch Disease*, yaitu kondisi ketika *booming* sektor sumber daya alam menyebabkan pergeseran sumber daya ekonomi dari sektor lain, seperti pertanian dan industri manufaktur. Sektor pertambangan nikel yang cenderung padat modal (*capital-intensive*) memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja secara luas, sekaligus berpotensi menggeser perkembangan sektor tradisional yang sebelumnya menjadi basis ekonomi lokal.

Dampak lanjutan dari karakteristik sektor pertambangan yang padat modal adalah melemahnya kontribusi sektor-sektor non-unggulan serta meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap komoditas tertentu. Dominasi sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel dapat menciptakan struktur ekonomi yang tidak seimbang, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Sektor pertambangan yang bersifat padat modal dan kurang terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal juga dapat memicu gejala *deindustrialisasi prematur*, yaitu menurunnya peran sektor manufaktur sebelum mencapai tahap industrialisasi yang matang. Ketimpangan struktur ekonomi antar sektor juga memperlihatkan adanya ketimpangan antar sektor dalam struktur perekonomian daerah. Sektor pertambangan dan pengolahan nikel mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sementara sektor lain seperti pertanian dan perikanan cenderung stagnan. Pada kerangka teori

pembangunan tidak seimbang (*unbalanced growth*), kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa investasi yang terpusat pada sektor tertentu dapat memicu pertumbuhan, namun sekaligus menciptakan kesenjangan antar sektor dan wilayah (Hirschman, 1958). Model *export-led growth* berbasis nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berpotensi menimbulkan dualisme struktural dalam perekonomian daerah. Di satu sisi, terdapat pusat-pusat industri yang terintegrasi dengan pasar global dan menunjukkan pertumbuhan pesat, di sisi lain, terdapat wilayah dan sektor ekonomi yang tertinggal. Dualisme struktural dalam perekonomian daerah memperkuat gejala *resource curse*, di mana kekayaan sumber daya alam tidak selalu diikuti oleh pemerataan pembangunan.

Pemerintah secara konsisten menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota. Sasaran utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat justru dapat memicu ketimpangan pembangunan antar daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai ketimpangan pembangunan antar daerah mencerminkan adanya hubungan non-linear antara pertumbuhan dan ketimpangan, di mana pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung disertai dengan peningkatan ketimpangan sebelum akhirnya menurun pada tahap yang lebih matang. Bagi negara berkembang, salah satu tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) supaya berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Hasan and Piliang, 2023).

Tingkat pertumbuhan ini tercermin melalui laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu indikator yang menunjukkan perubahan output riil suatu daerah dari waktu ke waktu. Penggunaan PDRB ADHK menjadi sangat relevan dalam analisis ketimpangan regional karena telah menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga mampu menggambarkan produktivitas riil dan kapasitas ekonomi antar wilayah secara lebih akurat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya ketimpangan regional di Maluku Utara dapat dijelaskan melalui pola transformasi struktural dalam Hipotesis U-Terbalik Kuznets. Perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern dengan produktivitas lebih tinggi cenderung meningkatkan ketimpangan pada tahap awal (Kuznets, 1955). Pada Maluku Utara, transformasi dari sektor pertanian dan perikanan menuju industri pengolahan nikel telah menciptakan perbedaan produktivitas yang signifikan antar wilayah. Kabupaten/kota yang menjadi pusat industri, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, mengalami lonjakan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki basis sumber daya mineral.

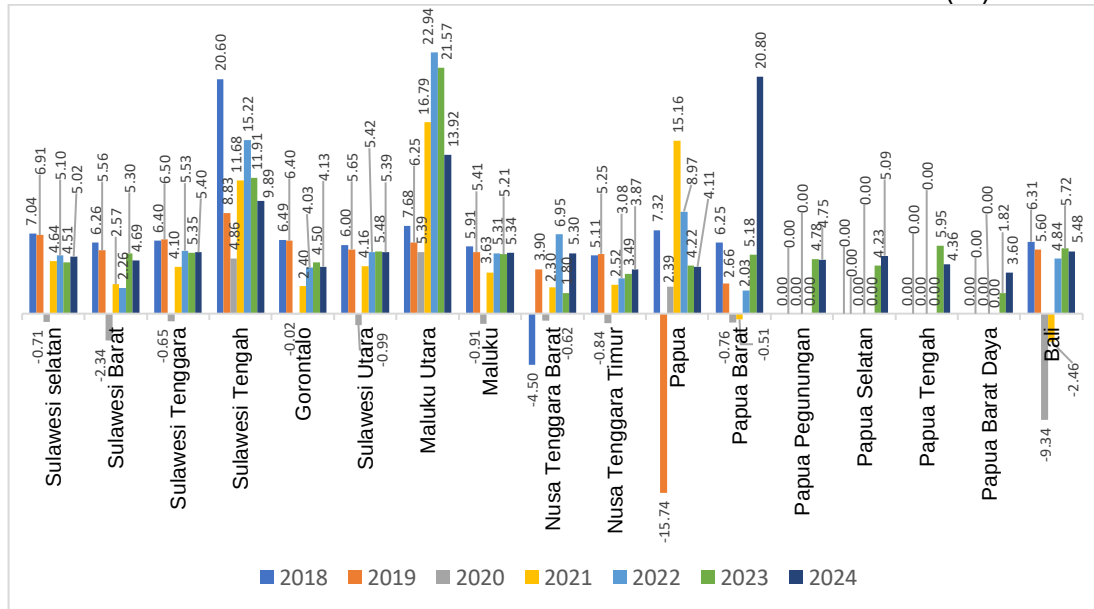
Temuan empiris juga menunjukkan bahwa ketimpangan regional cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum akhirnya menurun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya dua fase utama, yaitu divergensi dan konvergensi. Pada fase divergensi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru memperlebar kesenjangan antar wilayah, sedangkan pada fase konvergensi ketimpangan mulai menurun seiring dengan penyebaran pembangunan. Kondisi saat ini provinsi Maluku Utara masih berada pada fase divergensi, di mana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh

sektor ekspor nikel belum terdistribusi secara merata. Terdapat *trade-off* jangka pendek antara pertumbuhan dan pemerataan, di mana kebijakan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan ketimpangan sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan. Di provinsi Maluku Utara, strategi *export-led growth* berbasis nikel telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun manfaatnya cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang menjadi pusat industri. Kondisi ini diperkuat oleh karakteristik industri yang bersifat padat modal dan terkonsentrasi secara spasial (*enclave economy*), sehingga tidak sepenuhnya mendorong pemerataan pembangunan.

Penurunan ketimpangan dalam kerangka Hipotesis Kuznets hanya dapat terjadi apabila didukung oleh perubahan struktural dan kebijakan institusional yang memadai, seperti penguatan sistem redistribusi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa intervensi tersebut, daerah berisiko mengalami ketimpangan yang berkepanjangan meskipun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Maluku Utara menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan PDRB belum tentu mencerminkan pembangunan yang inklusif. Untuk melihat bagaimana pola pertumbuhan ekonomi terjadi dalam skala yang lebih luas, perlu dilakukan perbandingan dengan provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Perbandingan ini menjadi relevan karena sebagian besar wilayah KTI memiliki karakteristik ekonomi yang relatif serupa, terutama yang berbasis sumber daya alam. laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan gambar 1.1, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Maluku Utara selama periode 2018-2024 tercatat sebesar 13,51%. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia, capaian tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, bahkan secara konsisten berada pada kelompok dua besar selama periode pengamatan. Menunjukkan bahwa perekonomian Maluku Utara berada dalam tren positif dengan kinerja pertumbuhan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 7,68% pada tahun 2018 dan sebesar 6,25% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif sebesar 5,39% di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi meningkat sangat signifikan menjadi 16,79% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 22,94% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi masih berada pada tingkat yang sangat tinggi yaitu

sebesar 21,57%, kemudian melambat menjadi 13,92% pada tahun 2024. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi belum tentu mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di dalamnya. Perbedaan karakteristik wilayah, sumber daya ekonomi, serta basis kegiatan produktif dapat menyebabkan laju pembangunan yang tidak merata. Fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan tidak hanya terjadi di Provinsi Maluku Utara, tetapi juga dapat ditemukan pada beberapa provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sulawesi Tengah beberapa kali menempati posisi tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi selama periode 2018-2023, yang didorong oleh pesatnya perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya hilirisasi nikel di wilayah Morowali. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 20,60% pada tahun 2018, menurun menjadi 8,83% pada tahun 2019, mengalami kontraksi sebesar 4,86% pada tahun 2020, kemudian mengalami meningkat menjadi 11,68% pada tahun 2021, melonjak menjadi 15,22% pada tahun 2022, dan sebesar 11,91% pada tahun 2023, sebelum melambat menjadi 9,89% pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut juga diiringi oleh ketimpangan antar wilayah, karena aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada kawasan industri tertentu sehingga tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh daerah. Selain Sulawesi Tengah, Papua Barat menunjukkan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2024 dan menempati peringkat pertama di Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat sebesar 6,25% pada tahun 2018, menurun menjadi 2,66% pada tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi sebesar -0,76% pada tahun 2020 dan -0,51% pada tahun 2021, mulai pulih

menjadi 2,03% pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 5,18% pada tahun 2023, sebelum melonjak tajam menjadi 20,80% pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja sektor migas, khususnya produksi gas alam cair (LNG). Karakteristik pertumbuhan yang bersumber dari sektor ekstraktif dan bersifat sektoral menyebabkan distribusi manfaat pembangunan menjadi terbatas, sehingga potensi ketimpangan antar wilayah tetap tinggi.

Berbeda dengan kedua provinsi Sulawesi Tengah dan Papua Barat, Maluku Utara menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten berada pada kelompok tertinggi selama periode 2018-2024, yaitu selalu berada pada peringkat dua besar berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Konsistensi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tidak hanya bersifat fluktuatif jangka pendek, melainkan memiliki pola yang lebih stabil dalam periode pengamatan. Pemilihan Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan empiris dan metodologis, yaitu karena wilayah ini mampu merepresentasikan fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi yang berlangsung secara berkelanjutan, sekaligus dihadapkan pada permasalahan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadikan Maluku Utara relevan untuk dianalisis dalam mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan ketimpangan wilayah.

Ketidakseimbangan antara tingginya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan mencerminkan kondisi *high growth-high inequality*, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh distribusi yang seimbang. Pada provinsi Maluku Utara pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut secara dominan ditopang oleh sektor pertambangan nikel dan industri pengolahannya

yang bersifat padat modal (*capital-intensive*) dan terkonsentrasi secara geografis. Karakteristik sektor ini cenderung menghasilkan nilai tambah yang besar, tetapi memiliki keterbatasan dalam menciptakan kesempatan kerja yang luas serta keterkaitan dengan sektor ekonomi lokal. Pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat modal dan terkonsentrasi secara spasial dikenal dalam ekonomi wilayah sebagai *enclave economy*, yaitu struktur ekonomi di mana aktivitas produksi modern berkembang secara terpisah dari ekonomi lokal sehingga manfaat pertumbuhan tidak menyebar secara optimal.

Ciri *enclave economy* di Maluku Utara dapat dilihat dari terkonsentrasinya aktivitas industri di wilayah tertentu, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, yang berkembang pesat akibat investasi industri nikel. Sebaliknya, wilayah lain yang tidak memiliki basis sumber daya serupa cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah menciptakan pola *dual economy*, yaitu *coexistence* antara wilayah dengan pertumbuhan tinggi dan wilayah yang relatif tertinggal. Keterkaitan antar sektor (*linkages*) baik ke belakang (*backward linkage*) maupun ke depan (*forward linkage*) masih terbatas, sehingga dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal menjadi kurang optimal.

Spillover effect dari pusat-pusat pertumbuhan juga belum terjadi secara merata. Idealnya, pertumbuhan di wilayah unggulan dapat mendorong perkembangan wilayah sekitarnya melalui distribusi investasi, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi turunan. Namun, pada struktur ekonomi berbasis sektor ekstraktif, efek penyebaran tersebut cenderung terbatas karena tingginya ketergantungan pada input dari luar daerah, sehingga menimbulkan kebocoran

ekonomi (*leakage*). Akibatnya, peningkatan output regional tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

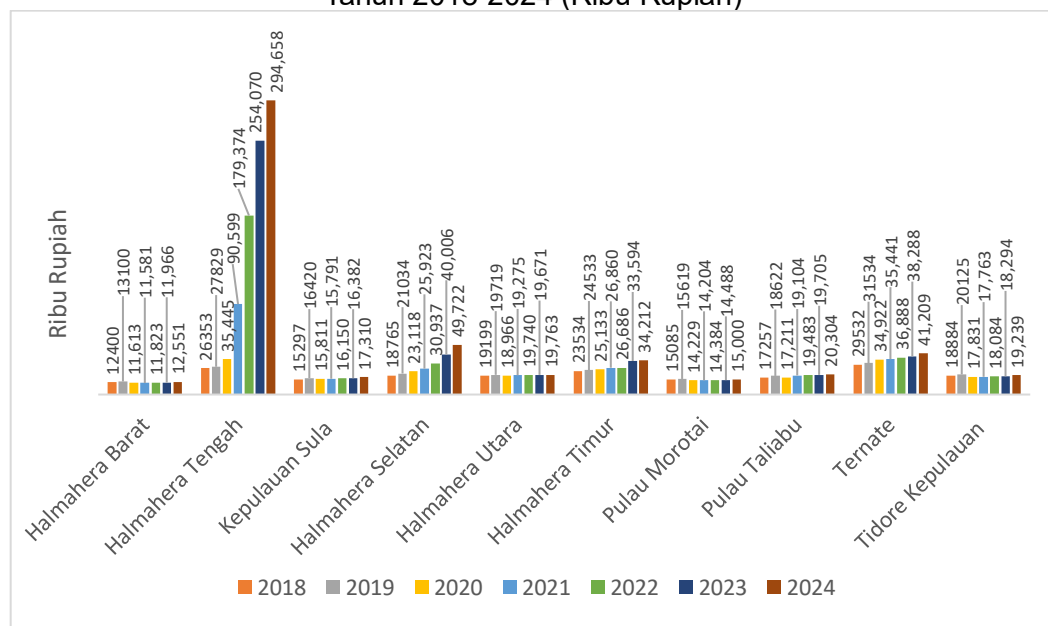
Keterbatasan efek penyebaran pertumbuhan sejalan dengan Hipotesis U-Terbalik Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan akibat konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor dan wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan antar wilayah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan keterkaitan antar sektor, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Tikson dalam (Christianingrum, 2021) Salah satu indikator kesejahteraan yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan tersebut adalah PDRB per kapita, di mana semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. PDRB per kapita tidak hanya mencerminkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, tetapi juga menggambarkan kapasitas ekonomi suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah dari aktivitas produksinya. Oleh karena itu, indikator ini sering digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah (Christianingrum, 2021).

Perbedaan nilai PDRB per kapita antar wilayah dapat mencerminkan adanya disparitas spasial yang dipengaruhi oleh variasi sumber daya, struktur ekonomi, serta tingkat keterkaitan antar sektor. Disparitas spasial semakin terlihat ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti yang terjadi di Provinsi

Maluku Utara didominasi oleh sektor-sektor tertentu yang bersifat padat modal dan terkonsentrasi secara geografis. Struktur ekonomi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah, karena manfaat pertumbuhan tidak tersebar secara merata. Semakin besar perbedaan nilai PDRB per kapita antara wilayah dengan nilai tertinggi dan terendah, maka semakin besar pula tingkat disparitas pembangunan yang terjadi. Oleh karena itu, indikasi adanya potensi ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat melalui grafik berikut.

Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2024 (Ribuan Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat nilai PDRB Perkapita ADHK setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB Perkapita ADHK kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara selama periode 2018-2024. Kabupaten Halmahera Tengah memiliki nilai tertinggi dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 26.353 pada tahun 2018 menjadi 294.658 pada tahun 2024.

Kenaikan terjadi secara bertahap namun sangat tajam, yaitu meningkat menjadi 27.829 pada tahun 2019, 35.445 pada tahun 2020, 90.599 pada tahun 2021, 179.374 pada tahun 2022, dan 254.070 pada tahun 2023. Sebaliknya, beberapa wilayah lain menunjukkan nilai yang relatif jauh lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat. Kabupaten Halmahera Barat mengalami penurunan dari 12.400 pada tahun 2018, menjadi 13.100 pada tahun 2019, menjadi 11.613 pada tahun 2020 dan 11.581 pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat secara bertahap menjadi 12.551 pada tahun 2024. Pola yang relatif stagnan juga terlihat pada Kepulauan Sula yang hanya meningkat dari 15.297 pada tahun 2018 menjadi 16.420 pada tahun 2019 menjadi 17.310 pada tahun 2024, serta Pulau Morotai dari 15.085 pada tahun 2018 menjadi 15.000 pada tahun 2024 yang menunjukkan fluktuasi dan pertumbuhan yang cenderung lambat.

Kesenjangan terlihat dari tingginya PDRB Kabupaten Halmahera Tengah yang di dorong oleh aktivitas hilirisasi industri nikel berskala besar, sementara beberapa kabupaten lainnya masih memiliki kapasitas ekonomi yang jauh lebih rendah. Selisih antara wilayah tertinggi (Halmahera Tengah sebesar 294.658) dan wilayah dengan nilai relatif rendah seperti Halmahera Barat (12.551) atau Pulau Morotai (15.000) pada tahun 2024 menunjukkan kesenjangan yang sangat besar, bahkan lebih dari 20 kali lipat.

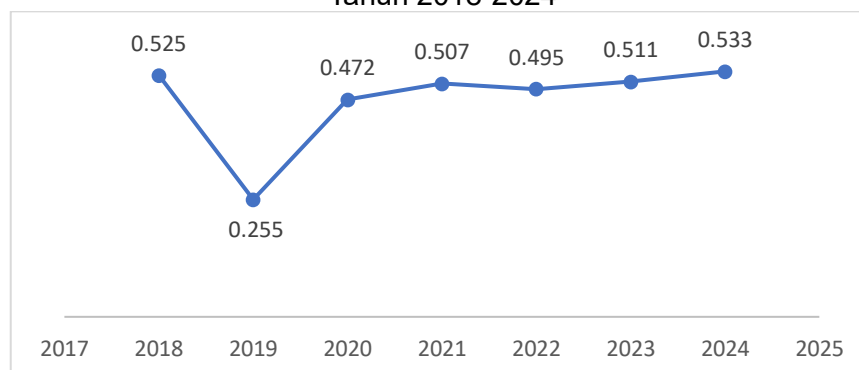
Perbedaan tingkat PDRB antar wilayah mengindikasikan adanya polarisasi pertumbuhan, di mana aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keunggulan sumber daya dan investasi, sementara wilayah lainnya berkembang lebih lambat. Wilayah seperti Ternate dan Halmahera Selatan memang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, masing-masing dari 29.532 menjadi 41.209 dan dari 18.765 menjadi 49.722

selama periode 2018-2024, namun peningkatan tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan lonjakan ekstrem yang terjadi di Halmahera Tengah. Ketimpangan menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya mengarah pada ekonomi yang inklusif, karena manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata antar kabupaten/kota. Perbedaan PDRB ADHK antar wilayah menjadi indikator awal adanya disparitas pembangunan ekonomi yang perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif, seperti Indeks Williamson dan Tipologi Klassen, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat ketimpangan regional di Provinsi Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 kabupaten/kota yang memiliki heterogenitas spasial, baik dari sisi kapasitas ekonomi maupun potensi sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, tidak semua daerah mampu mengelola potensi tersebut secara optimal. Perbedaan kemampuan daerah dalam menarik investasi, menyediakan infrastruktur, serta mengembangkan sektor unggulan menyebabkan terjadinya ketimpangan hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah semakin terlihat saat ini, di mana Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat yang didorong oleh hilirisasi industri pertambangan, khususnya nikel. Meskipun pertumbuhan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah secara agregat, manfaatnya belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota. Aktivitas ekonomi yang cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu justru memperkuat kesenjangan pembangunan antar daerah.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah sering diukur melalui perbedaan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar daerah. Untuk melihat tingkat ketimpangan secara kuantitatif, Indeks Williamson digunakan sebagai ukuran seberapa jauh perbedaan PDRB per kapita antar wilayah. Tingginya tingkat ketimpangan tidak hanya berdampak pada perbedaan kesejahteraan masyarakat tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti kecemburuan sosial, ketidakmerataan layanan publik serta ketidakstabilan ekonomi. Indikasi dari adanya ketimpangan di Provinsi Maluku Utara adalah nilai Indeks Williamson yang masih tinggi, sehingga menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Gambar 1.3 Perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rata-rata provinsi. Nilai indeks yang mendekati angka satu menggambarkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan gambar 1.3 ketimpangan antar wilayah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2018-2024. Pada tahun 2018 nilai indeks tercatat 0,525 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,255 dan meningkat menjadi

0,472 pada tahun 2020. Akselerasi ketimpangan spasial mulai terlihat pada tahun 2021 ketika indeks mencapai angka 0,507, kemudian sedikit menurun menjadi 0,495 pada tahun 2022, 0,511 ditahun 2023 dan mencapai 0,533 pada tahun 2024. Nilai ketimpangan yang mencapai 0,533 pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan disparitas pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Kenaikan yang relatif konsisten ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan semakin melebar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi yang cenderung terpusat pada wilayah-wilayah tertentu.

Fenomena peningkatan ketimpangan semakin diperkuat oleh adanya nilai PDRB per kapita yang sangat tinggi di Kabupaten Halmahera Tengah, yang pada tahun 2024 mencapai sekitar 294.658. Angka tersebut jauh melampaui kabupaten/kota lainnya dan berperan sebagai *outlier* dalam distribusi PDRB regional. Tingginya nilai ini tidak terlepas dari dominasi sektor pertambangan nikel dan aktivitas hilirisasi industri yang terkonsentrasi di wilayah tersebut. Kesenjangan nilai PDRB per kapita antar wilayah menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan di Halmahera Tengah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga menciptakan distorsi dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Akibatnya, indikator ketimpangan seperti Indeks Williamson meningkat karena adanya perbedaan yang sangat mencolok antara daerah dengan basis industri ekstraktif dan daerah yang masih bertumpu pada sektor tradisional.

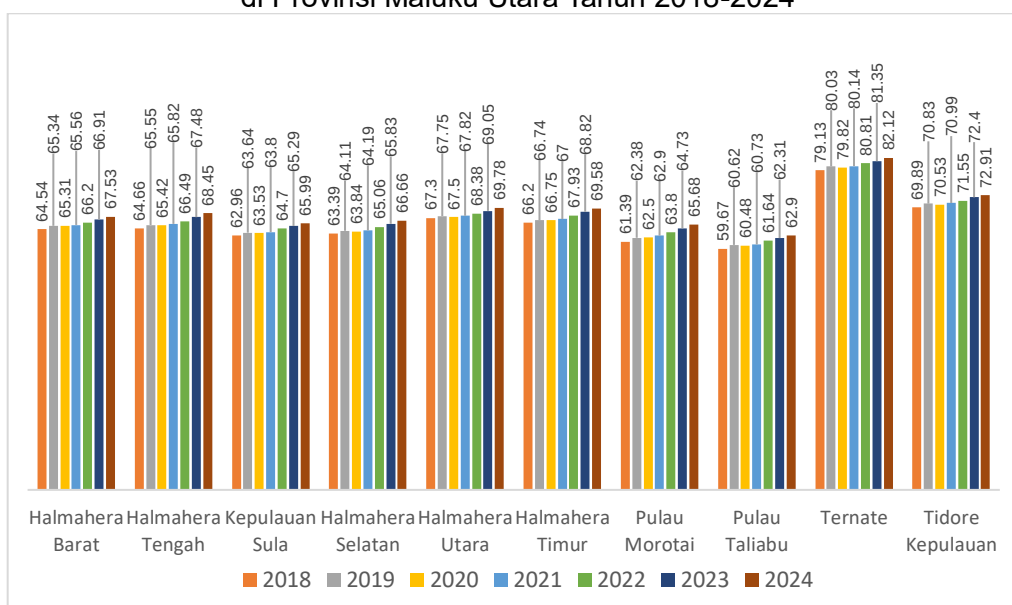
Fenomena meningkatnya Indeks Williamson menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah tertentu belum mampu menarik nilai perekonomian kabupaten/kota lain secara merata. Daerah dengan basis industri besar mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah

yang masih terbatas dalam infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang ada. Perspektif ekonomi regional, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *Backwash Effect* yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, yaitu fenomena di mana pertumbuhan ekonomi yang terpusat di suatu wilayah justru menarik sumber daya dari daerah sekitarnya, seperti tenaga kerja, modal, dan investasi (Maghfirah and Irfan, 2026). Pada Provinsi Maluku Utara, perkembangan pesat sektor pertambangan dan hilirisasi industri di Kabupaten Halmahera Tengah berpotensi menciptakan efek penarikan tersebut, sehingga daerah lain mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensi ekonominya. Sebaliknya, *Spread Effect* yang diharapkan yaitu penyebaran manfaat pembangunan ke wilayah sekitar belum terjadi secara optimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu wilayah tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten/kota. Hal ini semakin menegaskan bahwa peningkatan Indeks Williamson mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang dipengaruhi oleh pola pembangunan yang tidak seimbang antar wilayah.

Perbedaan karakteristik demografis serta kualitas sumber daya manusia antar daerah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi munculnya ketimpangan wilayah. Ketimpangan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepemilikan modal (*capital*), tetapi juga oleh adanya kesenjangan kualitas input, khususnya dalam bentuk kualitas tenaga kerja (*human capital*). Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan karena berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan faktor produksi.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah mampu meningkatkan pendapatan per kapita sehingga pertumbuhan ekonominya ikut mengalami peningkatan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi capaian tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya nilai IPM akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas penduduk (Sutrisno et al., 2024). Apabila IPM suatu daerah rendah, maka produktivitas masyarakat cenderung rendah sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IPM, semakin besar pula kemampuan penduduk untuk berproduktivitas, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan dan PDRB daerah (Azim et al., 2022). Permasalahannya, nilai IPM antar wilayah tidaklah sama, yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi demografis. Variasi IPM inilah yang menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Kabupaten/kota dengan tingkat pembangunan manusia lebih maju, seperti Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih berkembang seperti Kabupaten Pulau Taliabu. Variasi nilai IPM antar wilayah ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum merata di seluruh provinsi. Oleh karena itu, IPM dapat dijadikan salah satu indikator penting untuk menilai adanya ketimpangan pembangunan wilayah, karena perbedaan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan kesejahteraan antar wilayah dapat dianalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tren perubahannya selama periode tertentu. Peningkatan IPM yang diiringi dengan menurunnya disparitas antar wilayah menunjukkan adanya konvergensi, yang menunjukkan berkurangnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila peningkatan IPM diikuti dengan melebarnya disparitas antar wilayah menunjukkan adanya divergensi, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan menjadi isu penting yang harus diperhatikan karena proses pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah berkembang lebih cepat, sementara daerah lainnya tertinggal, sehingga menimbulkan disparitas ekonomi (Handayani and Endang, 2025). Kondisi ketimpangan antar wilayah mendorong

perlunya penelitian untuk menganalisis penyebab dan tingkat ketimpangan di setiap wilayah, termasuk pengaruh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (IPM), yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Tipologi Klassen berperan memberikan gambaran posisi masing-masing daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif terhadap provinsi, sehingga dapat diketahui apakah suatu wilayah termasuk maju, berkembang cepat, atau masih tertinggal (Ambar et al., 2021). Melihat adanya dinamika pembangunan yang terus berubah dari tahun ke tahun, khususnya pada periode 2018-2024 yang mencakup masa pandemi dan pemulihan ekonomi, penting untuk meneliti bagaimana disparitas antar wilayah berkembang serta faktor apa yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dinamika disparitas ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, memetakan klasifikasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan Tipologi Klassen, serta menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat ketimpangan menggunakan analisis regresi data panel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2018-2024?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2018-2024?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2018-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2018-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM secara simultan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan literatur mengenai ketimpangan pembangunan regional. Dengan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (IPM) terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang disparitas ekonomi atau topik terkait pembangunan wilayah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Dengan memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap Indeks Williamson, kebijakan pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran, sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pembangunan daerah yang merata dan pemanfaatan potensi wilayah secara optimal.

c. Manfaat Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Universitas Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kelembagaan serta mendukung pengembangan akademik di Universitas Bojonegoro, khususnya dalam pelaksanaan tiga fungsi utama perguruan tinggi. Dari sisi akademik, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar pada berbagai program studi, seperti ekonomi pembangunan, agribisnis, perencanaan wilayah, dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan daerah dan dinamika kependudukan.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara dan dokumen resmi pemerintah daerah. Objek

penelitian mencakup periode 2018-2024 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software E-Views 12* dan *Microsoft Excel*. Analisis data panel dipilih karena mampu menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan antar wilayah (*cross section*), sehingga dapat memberikan hasil estimasi yang lebih akurat. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota yang diukur menggunakan Indeks Williamson pada Provinsi Maluku Utara periode 2018–2024, baik secara parsial maupun simultan.
3. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, ketimpangan pembangunan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti investasi, infrastruktur, tingkat kemiskinan, belanja pemerintah, struktur ekonomi daerah, serta faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya dapat menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.